

KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN HASIL-HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN: SUATU PENGALAMAN EMPIRIS DI LAPANGAN*)

Oleh:

Eko Legowo**)

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan nasional jangka panjang adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk sektor pertanian, hal ini berarti membangun produsen pertanian, yaitu petani, nelayan dan produsen besar, seutuhnya. Arah pembangunan pertanian adalah membuat sektor pertanian menjadi maju, efisien dan tangguh. Ciri dari pertanian tangguh adalah mampu memanfaatkan segala sumberdaya secara optimal, mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang dihadapi, mampu menyesuaikan struktur dan pola produksi terhadap perubahan teknologi dan permintaan pasar, dan berdampak positif terhadap pembangunan nasional dan wilayah. Secara singkat, pertanian tangguh adalah pertanian yang dinamis, fleksibel, dan produktif. Arti praktis dari pengembangan pertanian tangguh adalah pengembangan pertanian berskala usaha. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan pertanian pola kemampuan pengusahaan dan pengelolaan serta penerapan teknologi yang tepat pada usaha-usaha pertanian perlu terus ditingkatkan.

Semakin maju petani, semakin tinggi tuntutananya terhadap produksi dan efisiensi usahatani, sehingga semakin memerlukan usaha yang dapat mempercepat sampainya hasil-hasil penelitian kepada petani untuk diterapkan pada usahatani. Selanjutnya, kemajuan yang dicapai petani mendorong pula timbulnya keperluan informasi teknis dan ekonomis yang lebih besar untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul. Namun, ada sinyalemen bahwa hubungan antara penelitian dengan penyuluhan masih belum melembaga. Keterkaitan program antara penelitian dan penyuluhan masih belum sinkron. Hubungan kerja antara peneliti dan penyuluh masih belum akrab. Sehingga mudah dimengerti bahwa meskipun hasil-hasil penelitian telah bertumpuk di balai penelitian pertanian akan tetapi belum dimanfaatkan sebagai materi penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, apalagi diterapkan oleh petani di tingkat lapangan. Kendatipun beberapa hasil penelitian telah sampai kepada penyuluh, seringkali dipandang belum siap pakai sehingga tidak segera diterapkan atau kurang spesifik sehingga diragukan ketepatangunaannya.

*) Disampaikan dalam Pertemuan Teknis III Koordinasi Penelitian Agro Ekonomi, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian RI, 31 Oktober dan 1 November 1989, Cipayung-Bogor.

**) Penyuluh Pertanian Spesialis Propinsi Jawa Timur.

Pertemuan Teknis III Koordinasi Penelitian Agro Ekonomi telah mengambil langkah maju untuk meningkatkan komunikasi antara peneliti dan penyuluh. Makalah ini membahas mengenai kebutuhan dan ketersediaan akan hasil penelitian sosial ekonomi dalam hubungannya dengan kegiatan penyuluhan bagi petani di tingkat lapang.

KEBUTUHAN HASIL PENELITIAN

Dalam Pelita V tujuan pembangunan pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas dan memantapkan swasembada pangan
- (b) Meningkatkan produksi dan kualitas produksi hasil pertanian
- (c) Menganekaragamkan komoditas pertanian untuk perluasan pasar dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
- (d) Meningkatkan produktivitas usahatani dan nilai tambah komoditas usahatani untuk meningkatkan pendapatan petani
- (e) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat tani dalam kelembagaan ekonomi sosial pedesaan khususnya KUD dan kelompok tani

Sehubungan dengan itu, secara total hasil-hasil penelitian yang dibutuhkan adalah semua hasil penelitian yang dapat menunjang pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pertanian tersebut diatas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungannya dengan kegiatan penyuluhan pertanian ada dua isu pokok yang perlu mendapatkan perhatian peneliti dan penyuluh secara intensif karena kedua-duannya merupakan kunci sukses pembangunan pertanian di tingkat lapang, yaitu: (1) Pendayagunaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan (2) Pembinaan Kelompok Tani. BPP adalah perencanaan pembangunan pertanian di tingkat lapang, sedangkan Kelompok Tani adalah pelaksana pembangunan pertanian di tingkat lapang.

Pendayagunaan BPP

Sistem pembinaan lembaga penyuluhan pertanian di tingkat operasional diarahkan untuk menunjang kemampuan teknis Penyuluh Pertanian dalam menyusun program penyuluhan pertanian, mempersiapkan rencana kegiatan, dan memantau serta mensupervisi pelaksanaannya. Korps Penyuluh Pertanian yang bertugas di BPP, yaitu Penyuluh Pertanian Urusan Programa (PPUP), dipersiapkan sebagai perancang dan perekayasa metoda penyuluhan yang dapat menggerakkan masyarakat tani di wilayah kerjanya untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan pertanian. Pendayagunaan BPP dapat ditinjau dari tiga gatra yang biasa disebut "3C", yaitu: (a) "content" (materi), (b) "conduct" (tata laksana), dan (c) "contour" (kelembagaan).

Materi Penyuluhan

BPP diharapkan dapat mengoptimasikan pemanfaatan sumberdaya lahan dan tenaga dalam wilayah kerjanya dengan melalui penerapan teknologi hemat lahan dan usahatani konservasi untuk mencapai produktivitas tinggi, pendapat-

an tinggi dan kelestarian sumberdaya alam. Untuk memberikan kemudahan bagi PPUP dalam menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Tahunan diperlukan adanya acuan induk yang didasarkan atas penelitian yang mendalam, kesepakatan berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan pertanian, dan berlaku untuk jangka waktu menengah/panjang. Acuan induk ini diberi nama "Rancang bangun WKBPP". Rancang bangun WKBPP merupakan "master design" dari suatu wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian. Rancang bangun WKBPP ini merumuskan permasalahan dan menyusun rekayasa-rakayasa, baik teknis, sosial, maupun ekonomis, yang perlu dilaksanakan dalam jangka menengah/panjang di dalam suatu wilayah kerja BPP untuk mengisi jurang antara keadaan aktual dan keadaan potensial.

Penelitian sosial ekonomi pertanian yang diperlukan untuk menunjang penyusunan Rancang bangun WKBPP adalah penelitian-penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut (LP Unpad, 1988; Legowo dkk., 1989):

- (a) Model Rancang bangun WKBPP
- (b) Inventarisasi dan analisa potensi sumberdaya
- (c) Analisa komoditas
- (d) Analisa tata guna lahan
- (e) Sistem pengembangan teknologi
- (f) Sistem penyuluhan pertanian
- (g) Sistem pelayanan sarana produksi dan kredit
- (h) Sistem pasca panen dan pemasaran
- (i) Sistem tenaga kerja pertanian, dan
- (j) Kondisi budaya sosial

Tata Laksana Penyuluhan

Sejak tahun 1976 tata laksana penyuluhan pertanian menggunakan sistem kerja latihan dan kunjungan (Laku). Sistem kerja ini menyangkut tiga gatra, yaitu: (1) Latihan PPUP/PPL di BPP, (2) Kunjungan PPL ke Kelompok Tani, dan (3) Supervisi pelaksanaan latihan di BPP oleh PPS dan pelaksanaan kunjungan ke Kelompok Tani oleh PPUP. Dengan diberlakukannya sistem kerja Laku, maka pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian menjadi teratur dan rutin. Keteraturan inilah yang memang ditawarkan oleh sistem kerja Laku untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam penerapannya sistem kerja Laku telah membuktikan efektivitasnya dalam memberikan sumbangan atas tercapainya swasembada beras di Indonesia.

Namun demikian, keadaan rutin yang secara berkepanjangan belum terimbangi sepenuhnya dengan kelengkapan macam, jumlah dan mutu fasilitas dan tenaga penyuluh dewasa ini terasa mulai menimbulkan kejenuhan-kejenuhan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat lapang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin bertambah pesat dan beban tugas yang semakin bertambah padat, di satu pihak dan kebutuhan tenaga pelatih (PPS) yang belum dapat terpenuhi di lain pihak, maka pelaksanaan latihan bagi para penyuluh (PPUP, PPL) di BPP menjadi tersendat-sendat. Akibatnya, acara

kunjungan PPL ke Kelompok Tani juga menjadi kurang semarak, karena PPL kekurangan materi penyuluhan yang harus disampaikan dan dijelaskan pada waktu kunjungan tersebut (Legowo, 1989). Di satu Kabupaten, kehadiran PPS Kabupaten sebagai pelatih di BPP hanya mencapai 25 persen dan PPS Wilayah hanya mencapai 10 persen dari yang direncanakan (Ahmad, 1987). Kejenuhan dalam acara kunjungan terlihat dari kecenderungan menurunnya frekuensi kehadiran Kontak Tani dan tani maju dalam pertemuan Saung (Hubeis, 1987). Salah satu akibat dari adanya kejenuhan-kejenuhan ini adalah peningkatan kelas Kelompok Tani mengalami kemandegan (KEPAS, 1989, komunikasi pribadi).

Guna menunjang perkembangan sistem kerja Laku lebih lanjut dibutuhkan penelitian-penelitian mengenai analisa kebijaksanaan tata laksana penyuluhan pertanian, baik dalam gatra Latihan, Kunjungan, maupun Supervisi.

Kelembagaan Penyuluhan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor:

59 Tahun 1986

695/Kpts/LP.120/II/1986 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Per-

nian, maka pengelolaan BPP akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Namun, sampai saat ini penyerahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih banyak kendala yang belum dapat diatasi, misalnya masalah status lahan dan personalia BPP. Untuk merealisasi SKB Mendagri-Mentan tersebut dibutuhkan penelitian-penelitian yang mendalam mengenai kelembagaan BPP.

Pembinaan Kelompok Tani

Dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh, maka pembinaan Kelompok Tani diarahkan agar dapat menjadi wadah dinamika petani. Untuk itu, pembinaan Kelompok Tani perlu terus ditingkatkan meliputi kegiatan-kegiatan perangkat lunak sebagai berikut (Sekretariat BPP Bimas, 1988):

- a. Meningkatkan kepemimpinan Kontak Tani (Ketua Kelompok Tani) untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya dinamika Kelompok Tani dan kemampuan menggalang kerjasama diantara Kelompok Tani dan dengan KUD dan Perusahaan Pembimbing
- b. Melaksanakan tertib organisasi, administrasi, dan disiplin kelompok
- c. Mengembangkan kegiatan musyawarah-musyawarah kelompok untuk menetapkan kesepakatan-kesepakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian-penelitian sosial ekonomi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang usaha pembinaan Kelompok Tani adalah penelitian-penelitian mengenai unsur-unsur peningkatan kemampuan Kelompok Tani, yaitu:

- a. Penyebaran informasi
(Pencarian, penyampaian, pencernaan dan pemanfaatan informasi)
- b. Proses perencanaan
(Materi rencana kegiatan, kebutuhan kelompok, dan prosedur perencanaan)

- c. Kerjasama kelompok
(Bidang kerjasama antar kelompok dan prosedur kerjasama)
- d. Pengembangan fasilitas
(Macam fasilitas yang diperlukan dan pengaturan penggunaan fasilitas)
- e. Permodalan
(Pemupukan modal kelompok dan pemanfaatan modal kelompok)
- f. Perjanjian usaha
(Macam perjanjian usaha dan ketaatan terhadap perjanjian dengan pihak lain)
- g. Penanganan keadaan darurat
(Potensi keadaan darurat dan kesiapan penanganan hal-hal darurat)
- h. Pengembangan kepemimpinan dan keahlian
(Macam pelatihan yang diperlukan dan metoda pelatihan)
- i. Hubungan dengan KUD dan Perusahaan Pembimbing
(Konsep hubungan "melembaga", tata laksana pelayanan sarana produksi, tata laksana pelayanan kredit, penanganan pasca panen, dan jalur pemasaran hasil produksi pertanian)
- j. Produktivitas usahatani
(Model usahatani idaman dan model simulasi usahatani)

KETERSEDIAAN HASIL PENELITIAN

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa kebutuhan akan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dalam menunjang pembangunan pertanian, khususnya dalam bidang perencanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan dinamika Kelompok Tani, ternyata sangat banyak. Dalam bagian ini akan ditinjau ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian untuk digunakan dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

Ketersediaan

Dalam konstelasi aparat pembangunan pertanian, pelaksanaan penelitian pertanian dan kegiatan-kegiatan penunjangnya menjadi tugas unit-unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pada dasarnya hasil-hasil penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut (Tjitropranoto, 1989):

- (a) Informasi sebagai bahan penentuan kebijaksanaan
- (b) Informasi sebagai bahan rekomendasi/teknologi produksi
- (c) Informasi teknis ilmiah
- (d) Informasi ilmiah
- (e) Benih dan bibit
- (f) Prototip alat
- (g) Bahan lain (misalnya, vaksin)

Dari hasil-hasil penelitian tersebut di atas yang merupakan bahan untuk materi penyuluhan atau pengetahuan baru untuk penyuluh dan pelaksana pembangunan lainnya adalah informasi teknis ilmiah. Hasil penelitian yang bersifat

teknis ilmiah ini didesiminasikan melalui publikasi, baik yang diterbitkan secara berseri/berkala maupun yang diterbitkan menurut keperluan. Oleh karena itu, sampai tidaknya publikasi-publikasi ini ditangan penyuluh pertanian dapat digunakan sebagai ukuran ketersediaan hasil-hasil penelitian di tingkat lapang.

Penyuluh pertanian yang paling berkepentingan dengan ketersediaan hasil-hasil penelitian pertanian adalah Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS). Mengambil kasus Propinsi Jawa Timur, di Propinsi ini telah dirintis adanya 10 "perpustakaan" PPS, yaitu sebuah untuk setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dan sebuah lagi di Koordinatariat Propinsi. Dari 54 judul publikasi primer berseri lingkup Badan Litbang Pertanian, yang tersedia lengkap pada rak "perpustakaan" PPS hanyalah 5 judul, yaitu: (1) Penelitian Palawija, (2) MA-RIF Monograf, (3) Indonesian Agricultural Research and Development Journal, (4) Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan (5) Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Adapun judul yang kadang-kadang diterima tetapi tidak secara berkelanjutan adalah: (1) Agrikam, (2) Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, (3) Pemberitaan Penelitian Tanah dan Pupuk, dan (4) Indonesian Journal of Crop Science. Sedangkan judul-judul lain belum tersedia (Lampiran 1).

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ketersediaan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di tingkat lapang adalah sangat terbatas.

Kesesuaian dan Kesiapan

Latihan untuk para penyuluh di BPP sebaiknya lebih berorientasi pada pendekatan pemecahan masalah (problem solving approach) daripada pendekatan materi (subject matter approach) (Hubeis, 1987). Dengan demikian metoda latihan di BPP seharusnya lebih banyak berupa pemecahan masalah dan bukan penyampaian materi. Untuk itu diperlukan materi latihan yang bersifat diagnostik.

Cakupan penelitian agroekonomi Badan Litbang Pertanian, yaitu: (1) Analisa Komoditi, (2) Sumberdaya, (3) Kelembagaan, dan (4) Analisa Kebijakan (Badan Litbang Pertanian, 1987), sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan. Namun hasil-hasil penelitian yang tersedia sebagian besar sifatnya informatif, bukan diagnostik. Kalaupun ada yang berorientasi pada masalah, sifatnya masih berupa identifikasi masalah.

Semestinya adalah menjadi tugas PPS untuk merekayasa hasil-hasil penelitian yang bersifat informatif tersebut menjadi materi latihan yang bersifat diagnostik. Namun, jumlah dan kemampuan PPS Bidang Sosial Ekonomi masih sangat terbatas. Mengambil kasus Propinsi Jawa Timur, untuk melayani 236 BPP hanya tersedia 19 orang PPS Bidang Sosial Ekonomi (Lampiran 2). Tambahan lagi, para PPS tersebut belum dapat sepenuhnya mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk merakit materi latihan bagi PPUP/PPL di BPP karena masih mendapat beban tugas-tugas lain.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan dayaguna hasil-hasil penelitian di tingkat lapang, sehubungan dengan kemampuan daya cerna dan kesempatan PPS,

bentuk laporan hasil penelitian perlu lebih disederhanakan dan berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk lebih meningkatkan kesesuaian hasil-hasil penelitian dengan kebutuhan untuk digunakan dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, sebaiknya penelitian sosial ekonomi ditingkat lapang direncanakan bersama PPS. Mengambil kasus Propinsi Jawa Timur, kerjasama semacam ini telah berhasil dilaksanakan antara para peneliti dari Balittan Malang dan PPS Propinsi Jawa Timur dalam menangani "adaptive on-farm research" (Soedaryono dkk., 1989).

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Untuk memantapkan arah pembangunan pertanian menuju pertanian tangguh, dukungan penelitian sosial ekonomi pertanian adalah mutlak diperlukan. Kebutuhan akan hasil-hasil penelitian untuk melaksanakan pembangunann pertanian di tingkat lapang ternyata sangat banyak. Disarankan penelitian-penelitian sosial ekonomi pertanian difokuskan pada dua isu, yaitu: (a) Pendayagunaan BPP, dan (b) Pembinaan Kelompok Tani.

Mengingat ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian masih belum memenuhi harapan dipandang dari segi kepentingan penyuluhan pertanian, maka keterpaduan kerja antara penelitian agro ekonomi dan Penyuluh Pertanian perlu lebih ditingkatkan.

BAHAN BACAAN

- Ahmad, S.S. 1987. Tinjauan terhadap Pelaksanaan Kunjungan ke Wilkel (Hampan) dalam Sistem Kerja LAKU di Wilayah III Cirebon dan Kabupaten Sumedang. Makalah Tambahan disajikan pada Kongres Penyuluhan Pertanian 1987 PERHIPTANI, tanggal 4 - 6 Juli 1987, Subang. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 1987. Lima Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Litbang Deptan.
- Hubeis, A.V.S. 1987. Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Makalah Utama disajikan pada Kongres Penyuluhan Pertanian 1987 PERHIPTANI, tanggal 4 - 6 Juli 1987, Subang.
- Legowo, E. 1989. Pola Pengembangan Pertanian Berskala Usaha. Makalah Utama disajikan pada Simposium Nasional Agronomi 1989 PERAGI, tanggal 23 - 24 Januari 1989, Jakarta.
- Legowo, E., S. Masdoeki, T.T. Irianto, dan Soesianto. 1989. Rancang bangun dan Rekayasa WKBPP di Satuan Wilayah Pembangunan Probolinggo-Lumajang Propinsi Jawa Timur. Sekretariat Satuan Pembina BIMAS Propinsi Jawa Timur.
- Sekretariat Badan Pengendali BIMAS. 1988. Ringkasan Repelita V Intensifikasi Pertanian dengan Bimbingan Massal. Sekretariat B.P. BIMAS.
- Soedaryono, M. Soedarjo, M. Dahlan, C.E. van Santen, dan E. Legowo. 1989. Adaptive on-farm maize research in East Java. Makalah disajikan pada International Workshop on Development in Procedures for Farming Systems Research, tanggal 13 - 17 Maret 1989, Puncak - Bogor.
- Tim Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. 1988. Rancang bangun Rekayasa BPP dan Identifikasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kelompok Tani. Lembaga Penelitian Unpad, Bandung.
- Tjitropranoto, P. 1989. Tata Hubungan Fungsi Penelitian - Penyuluhan Pertanian. Makalah disajikan pada Coaching Koordinator PPS Tingkat Nasional, tanggal 20 - 22 Maret 1989, Jakarta.

Lampiran 1.

**Ketersediaan Publikasi Primer Berseri
Lingkup Badan Litbang Pertanian
Pada Perpustakaan PPS Propinsi Jawa Timur
Tahun 1989**

No.	Judul	Ketersediaan		
		Lengkap	Tidak lengkap	Tidak ada
1.	Contributions			X
2.	Penelitian Pertanian			X
3.	Seminar Balittan Bogor			X
4.	Buletin Teknik (Edisi Khusus)			X
5.	Media Penelitian Sukamandi			X
6.	Reflektor			X
7.	Penelitian Palawija	X		
8.	MARIF Monograf	X		
9.	Agrikam		X	
10.	Pemberitaan Penelitian Banjarbaru			X
11.	Pemberitaan Penelitian Sukarami			X
12.	Buletin Penelitian Hortikultura			X
13.	Hortikultura			X
14.	Penelitian Hortikultura			X
15.	Pemberitaan Penelitian Tanaman Industri			X
16.	Buletin Penelitian Rempah dan Obat			X
17.	Edisi Khusus Penelitian Tanaman Rempah dan Obat			X
18.	Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat		X	
19.	Edisi Khusus Hasil Penelitian Tembakau/Serat			X
20.	Buletin Balitka			X
21.	Jurnal Penelitian Kelapa			X
22.	Majalah Penelitian Gula			X
23.	Buletin Penelitian Gula			X
24.	Warta BP3G			X
25.	Menara Perkebunan			X
26.	Buletin Perkebunan			X
27.	Komunikasi Perkebunan			X
28.	Buletin Perkebunan Rakyat			X
29.	Lateks			X
30.	Buletin Perkebunan Medan			X
31.	Buletin Perkaretan			X
32.	Warta Perkaretan			X
33.	Prosiding Pertemuan Karet			X
34.	Majalah Pelita Perkebunan			X
35.	Buletin Penelitian Teh dan Kina			X
36.	Warta BPTK			X
37.	Ilmu dan Peternakan			X
38.	Wartazoa			X

Lampiran 1. Lanjutan.

No.	Judul	Ketersediaan		
		Lengkap	Tidak lengkap	Tidak ada
39.	Penyakit Hewan			X
40.	Balitvet Newsletter			X
41.	Seri Pengembangan Hasil Penelitian Perikanan			X
42.	Buletin Penelitian Perikanan Darat			X
43.	Jurnal Penelitian Perikanan Laut			X
44.	Jurnal Penelitian Pasca Panen			X
45.	Jurnal Penelitian Budidaya Pantai			X
46.	Jurnal Agro Ekonomi			X
47.	Forum Penelitian Agro Ekonomi			X
48.	Pemberitaan Penelitian Tanah dan Pupuk		X	
49.	Prosiding Pertemuan Teknis Penelitian Tanah			X
50.	Buletin Teknis Penelitian Tanah			X
51.	Indonesian Journal of Crop Science	X		
52.	Indonesian Agricultural Research and Development Journal	X		
53.	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian	X		
54.	Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian	X		

Lampiran 2.

Spesialisasi dan Pendidikan PPS Propinsi Jawa Timur

Spesialisasi	Pendidikan		
	S3	S2	S1
1. Tanah dan Tata Air	1	(1)	9 + (5)
2. Sosial Ekonomi	1	(1)	18 + (8)
3. Agronomi	—	3 + (1)	47 + (17)
4. Proteksi Tanaman	—	1 + (1)	8 + (3)
5. Peternakan	—	1	8
6. Perikanan	—	—	9
Jumlah	2	5 + (4)	99 + (33)

Catatan: Angka didalam tanda () menunjukkan bahwa PPS mendapat tugas lain (KPTRK, SPHB).

Pembahasan Atas Makalah

KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN HASIL-HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN: SUATU PENGALAMAN EMPIRIS DI LAPANGAN

Oleh:

Sjafri Mangkuprawira*)

1. Makalah yang ditulis dan disampaikan oleh Dr.Ir. Eko Legowo tentang kebutuhan dan ketersediaan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan pertanian perlu mendapat apresiasi, khususnya ditinjau dari berbagai perspektif berikut ini:
 - a. Apa batasan kebutuhan dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kebutuhan?
 - b. Apa batasan ketersediaan dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap ketersediaannya?
 - c. Apa akar masalah yang sebenarnya selama ini?
 - d. Apa dan bagaimana mekanisme yang efektif agar kebutuhan dan ketersediaan hasil penelitian mencapai titik keseimbangan yang diharapkan?
2. Kebutuhan akan hasil-hasil penelitian untuk pembangunan pertanian tidak cukup dilihat dari segi jumlah saja tetapi seharusnya mencakup aspek kualitas juga. Dari segi jumlah, penelitian sosial ekonomi pertanian relatif telah banyak dilakukan. Misalnya, apakah hasil-hasil penelitian tersebut sudah siap dapat diterjemahkan dan kemudian dirumuskan dalam bentuk implikasi strategi operasional di lapangan? Tentunya tidak semudah itu. Apa yang diharapkan Dr. Eko Legowo bahwa sebaiknya hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian dapat dianggap sebagai "resep" untuk langsung dipakai di lapangan, itu pun agaknya keinginan yang berbau "ambisius". Mengapa? Karena masalah-masalah masyarakat ternyata berdimensi kompleks, bukan saja dalam segi sosial-ekonomi tetapi juga segi lingkungan fisik. Jadi sebaiknya bagaimana? Yang terpenting seberapa jauh PPS mampu mengadaptasikan setiap hasil penelitian agroekonomi dalam bentuk antara formulasi identifikasi dan pendekatan masalah di lapangan.
3. Menurut saya permasalahan seperti diuraikan pada butir dua di atas dapat ditinjau dari tipe penelitian apa yang dikehendaki. Seperti diketahui beberapa tipe penelitian terdiri dari penelitian murni, dasar, terapan, kaji tindak (action research, AR) dan "participatory action research" (PAR). Kalau memang yang dibutuhkan berupa hasil penelitian, maka cenderung AR dan PAR layak untuk diterapkan. Sedangkan dua tipe terdahulu lebih banyak memiliki ciri-ciri akademis ketimbang aspek praktisnya. Tipe

*) Staf pengajar Fakultas Pertanian dan Pascasarjana IPB dan Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor.

AR dan PAR inilah yang diduga mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik lokasi di lapangan. Bahkan sekurangnya pada tipe PAR berbagai unsur masyarakat dan instansi termasuk PPS dan PPUP (Penyuluh Pertanian Urusan Programa) sejak tahap perencanaan penelitian telah diikutsertakan oleh peneliti. Dengan demikian, sejak awal peneliti diharapkan mampu mengantisipasi kegunaan strategi apa dari penelitian ini yang dikehendaki pemakai. Namun, dari sisi lain, tipe penelitian ini masih jarang dilakukan, karena dianggap terlalu spesifik dan jangkauannya terlalu mikro.

4. Hasil penelitian kasus Sulawesi Selatan menunjukkan kondisi yang hampir sama (lihat butir dua dan tiga). Mansur, H (1989) dalam hasil penelitiannya menunjukkan, tidak semua PPS telah membaca Agrikam walaupun tersedia di perpustakaan. Alasannya antara lain isinya terlalu teoritis dan banyak istilah-istilah yang kurang dimengerti sehingga sulit dicerna dan tidak sesuai dengan kebutuhan/masalah setempat. Bahkan ada gejala lain bahwa sekitar 80%, pada tiap hasil penelitian, selalu muncul implikasi bahwa perlu ada penelitian "lebih lanjut" (hasil telaahan pembahas). Dengan demikian, tidak mustahil hal tersebut akan lagi lagi membuat para pemakai (PPS, PPUP, dan PPL) tidak puas. Dalam kasus di atas tampaknya pembenahan perlakuan materi/pesan (massage treatment) pada isi jurnal, buletin dll. sangat penting sekali. Tetapi dari sudut PPS sendiri pun perlu dipertanyakan: (a) apa saja kebutuhan yang sudah dirasakan dan tidak dirasakan akan hasil penelitian agroekonomika, dan (b) apakah mereka sudah berupaya membuat jurnal praktis dari hasil penelitian agroekonomika untuk disebarluaskan kepada penyuluh lainnya (PPUP dan PPL). Dan ini tentunya akan sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman PPS itu sendiri dalam bidang penulisan dan penguasaan wawasan pengembangan ilmu dan teknologi pertanian. Dengan perkataan lain, disamping aspek kebutuhan, maka aspek kesiapan pemakai hasil penelitian akan mempengaruhi ketersediaan hasil penelitian dilingkungannya. Siapa tahu ketersediaan hasil penelitian yang langka di lapangan dapat disebabkan oleh (a) pihak peneliti/sponsor (pemasok) tidak tahu bahwa ada kebutuhan yang diminta dari pihak pemakai tertentu, (b) pihak pemakai kurang aktif menginformasikan kebutuhannya kepada instansi penelitian, dan (c) mekanisme proses diseminasi hasil penelitian belum efektif karena keterbatasan dana, misalnya.
5. Upaya PPS Jawa Timur untuk mengadakan kerjasama dengan pihak peneliti Balittan Malang patut dihargai. Hanya, dalam uraian makalah Dr. Legowo belum dijelaskan secara spesifik seberapa jauh penelitian yang bersifat "adaptive on farm research" tersebut ditinjau dari bagaimana prosesnya, koordinasinya, dan efektivitasnya. Hal ini penting diuraikan karena tema pertemuan ini lebih berorientasi pada pencapaian teknis koordinasi penelitian agroekonomi yang optimal. Dan informasi ini tentunya diharapkan dapat disebarkan kepada PPS di daerah lain.
6. Dari isi makalah Dr. Legowo dan pembahasan pada butir satu sampai lima di atas, maka beberapa hal yang dapat diungkapkan:

- (a) Kebutuhan akan hasil penelitian seharusnya tidak ditinjau dari kebutuhan yang dirasakan saja, tetapi juga kebutuhan yang tidak dirasakan dari pemakai. Implikasinya adalah pihak pemasok hasil penelitian perlu juga menciptakan kebutuhan yang tidak dirasakan menjadi yang dirasakan melalui "promosi-promosi" gencar ke pihak pemakai. Dr. Legowo telah menyusun topik-topik penelitian apa yang dibutuhkan. Namun, sebenarnya hal itu belum cukup spesifik ditinjau dari lingkup masalah lapangan, tujuannya, metoda, dan kegunaan hasil penelitian yang diharapkan.
- (b) Mereka yang dianggap paling mengetahui kebutuhan hasil penelitian adalah para pemakai itu sendiri. Namun demikian, apakah ketersediaan hasil penelitian itu sendiri sudah diikuti oleh kesiapan dari jumlah dan kualitas, termasuk isi yang sesuai dengan kebutuhan? Hal demikian penting agar hasil dari setiap penelitian yang dilakukan tidak mubazir. Karena itulah kontak aktif dari pemakai dan pemasok perlu ditingkatkan melalui media pos-telekomunikasi atau diskusi-diskusi seperti sekarang ini.
- (c) Menilik permasalahan dan kebutuhan pemakai hasil penelitian, maka tipe-tipe penelitian kaji tindak dan PAR memungkinkan pemenuhan kriteria dalam pendekatan masalah pembangunan pertanian yang spesifik lokasi/wilayah.
- (d) Menurut Dr. Legowo, dari 54 judul publikasi primer berseri lingkup Badan Litbang Pertanian hanya 5 judul (11 persen) yang tersedia secara lengkap di perpustakaan PPS tingkat Propinsi. Dimana yang lainnya? Dalam hal ini tentunya kita harus melihat bagaimana seharusnya mekanisme distribusi hasil penelitian selama ini. Untuk tercapainya mekanisme diseminasi hasil penelitian (kebutuhan dan ketersediaan) yang efektif, maka dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif dari lembaga-lembaga yang menangani dimensi-dimensi penyuluhan, yaitu dimensi **content, conduct, dan contour**.
- (e) Pihak perguruan tinggi pun seharusnya dapat terlibat dalam mekanisme tersebut. Namun, masalahnya tidak semua perguruan tinggi telah siap dengan itu. Disamping ada tugas-tugas lain seperti pendidikan/pengajaran (utama) dan pengabdian pada masyarakat maka mekanisme diseminasi hasil penelitian yang terjadi di dalam perguruan tinggi itu sendiri belum lancar (hubungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat belum Efektif). Selain itu ketidakpastian dalam faktor dana menyebabkan tidak lancarnya diseminasi hasil penelitian ke pihak pemakai.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

DAFTAR PANITIA*)

PANITIA PENGARAH

Ketua : Dr. Soetatwo Hadiwigeno
Sekretaris
merangkap anggota : Dr. Ir. Effendi Pasandaran
Anggota : Ir. Paransih Isbagio, M.Sc.
Dr. Ir. Faisal Kasryno
Dr. Ir. Chairil A. Rasahan
Ir. Zahiruddin Saleh
Dr. Ir. Achmad Suryana

PANITIA PELAKSANA

Ketua
merangkap anggota : Dr. Ir. Achmad Suryana
Wakil Ketua
merangkap anggota : Ir. Sahat M. Pasaribu, M.Eng.
Sekretaris
merangkap anggota : Ir. Handewi P. Saliem, MS.
Bendahara : Ir. Achmad Djauhari, MS.
Sie Persidangan
dan Makalah : Ir. Muchjidin Rachmat, MS.
Sie Logistik,
Publikasi dan
Dokumentasi : Drs. Benny Rachman

*) Berdasarkan SK Kepala Badan Litbang Pertanian, No. TU.110.057.1989, tanggal 18 September 1989.

Lampiran 2.

DAFTAR PESERTA

N a m a	Instansi
Jakarta	
1. Dr. Soetatwo Hadiwigeno	Badan Litbang
2. Ir. Paransih Isbagio, M.Sc.	Badan Litbang
3. Dr.Ir. Faisal Kasryno	Biro Perencanaan
4. Ir. Rusnadi, MSc	Bappenas
5. Humas Deptan	Humas Deptan
6. Dr.H.S. Dillon	Task Force Menmud Pertanian
7. Dr.Ir. Amin Aziz	PPA, Jakarta
8. Drs. Arselan Harahap	LP3ES
9. World Bank	World Bank
10. Mr. Elias T. Moning/Robert N.	USAID
11. Mr. Bradley	ADB
12. Mr. Danilo Vuyucie	FAO
13. Aloysius Dwiponggo	Puslitbangkan
14. Ir. Bambang Ismawan, MS	LSM
15. Drs. Surachmat Kusumo	Puslitbanghort
16. Dr. Ato Soeprapto	Kantor Menmud Pertanian
17. Dr. Edi Abdurachman, MSc	Pusdatik
18. Kapuslitbanghort	Puslitbanghort
19. Kapuslitbangkan	Puslitbangkan
Bogor	
20. Dr. Ir. Lutfi I. Nasoetion	LP-IPB
21. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira	LPPM-IPB
22. Prof.Dr.Ir. Sayogyo	LPSP-IPB
23. Dr. William L. Collier	PT. INDECO
24. Dr.Ir. E. Roekasah A.	IPB
25. Dr. Seiji Shindo/Dr. Irlan S.	ESCAP CGPRT Centre
26. Kapuslitbangtan	Puslitbangtan
27. Kapuslitbangtri	Puslitbangtri
28. Kapuslitbangnak	Puslitbangnak
29. Kapuslit Tanah	Puslit Tanah
30. Kapus Pustaka	Pustaka
31. Dr. P.G. Widjaja-Adhi	Puslit Tanah
32. Dr. Hans Anwarhan	Puslitbangtan
33. Dr. Ir. Doah Dekok Tarigans	Puslitbangtri
34. Dr. Parnabolon Sitorus	Puslitbangnak
35. Drs. Firdaus Ma'arus	Pustaka

N a m a	Instansi
36. Dr. Effendi Pasandaran 37. Dr. Chairil A. Rasahan 38. Dr.Ir. Hidajat Nataatmadja 39. Ir. Zahiruddin Saleh 40. Ir. Victor T. Manurung, MS 41. Dr.Ir. Achmad Suryana 42. Dr.Ir. Agus Pakpahan 43. Dr.Ir. Andin H. Taryoto 44. Ir. Sahat M. Pasaribu, M. Eng. 45. Ir. Handewi Purwati S., MS 46. Ir. Achmad Djauhari, MS 47. Ir. Muchjidin Rachmat, MS 48. Drs. Benny Rachman 49. Ir. Khairina M. Noekman, MS	Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi Puslit Agro Ekonomi
Bandung	
50. Ir. Karya Santana	PPS Jabar
Jawa Timur	
51. Dr.Ir. Eko Legowo, M.Sc 52. Dr.Ir. Iksan Semaoen 53. Ir. Imam Santoso 54. Ir. Noviar Yuana	PPS Jatim LP-Unibraw Petrokimia, Gresik Petrokimia, Gresik
Yogyakarta	
55. Dr. Gunawan Sumodiningrat	PPE-UGM Yogyakarta
Kalsel	
56. Ir. Hasmy Fadillah A.	PPS Banjarmasin
Sulsel	
57. Prof.Dr. H. Halide 58. Ir. Hardi Suhardi, MS	LP-Unhas Ujung Pandang PPS Uj.Pandang
Sumbar	
59. Ir. Amiruddin Dt. Bagindo	PPS Padang
Sumut	
60. Drs. Sobat Sembiring, M.Sc.	LP-USU Medan

N a m a	Instansi
---------	----------

Kupang

- | | |
|----------------------|---------------|
| 61. Dr. Engel Momuat | P3NTT (NTASP) |
|----------------------|---------------|

Panitia Teknis

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 62. Iskandar | Puslit Agro Ekonomi |
| 63. Agus Subekti | Puslit Agro Ekonomi |
| 64. Zulkhadman | Puslit Agro Ekonomi |
| 65. Endang Ruswandi | Puslit Agro Ekonomi |
| 66. Dwi Hartati | Puslit Agro Ekonomi |
| 67. Yulias Nuryatin Riani | Puslit Agro Ekonomi |
| 68. Agus Sujianto | Puslit Agro Ekonomi |
| 69. Iyus Rusmiati | Puslit Agro Ekonomi |
| 70. Asep Mad Yusuf | Puslit Agro Ekonomi |
| 71. Sa'ad | Puslit Agro Ekonomi |
| 72. Anwar | Puslit Agro Ekonomi |
| 73. Sudrajat | Puslit Agro Ekonomi |
| 74. Mulyana | Puslit Agro Ekonomi |
| 75. TVRI | Jakarta |
| 76. RRI | Jakarta |
| 77. Kompas (F.X. Puniman) | Bogor |
| 78. Antara | Jakarta |
| 79. Sinar Tani | Jakarta |
| 80. Suara Karya (Ioes Supriadi, SH) | Bogor |
| 81. Pikiran Rakyat (Ir. Uyun A.) | Bogor |
| 82. Ir. Arief Iswariyadi | Puslit Agro Ekonomi |
| 83. Ir. Bambang Sayaka | Puslit Agro Ekonomi |
| 84. Dr. Ir. Budiman Hutabarat | Puslit Agro Ekonomi |
| 85. Ir. Chaerul Saleh, MS | Puslit Agro Ekonomi |
| 86. Ir. Abunawan Mintoro, MS | Puslit Agro Ekonomi |
| 87. Dr. Ir. Pantjar Simatupang | Puslit Agro Ekonomi |
| 88. Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto | Puslit Agro Ekonomi |
| 89. Dr. Ir. Memed Gunawan | Puslit Agro Ekonomi |